



TAMBAHAN KUOTA SAMPAH HANYA SEMENTARA

Pemkab/Pemkot di DIY Jangan 'Njagakke'

YOGYA (KR) - Persoalan sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius bagi Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot di DIY.

Terbatasnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan menjadi tantangan tersendiri bagi kabupaten/kota dalam mengelola sampah. Kondisi itu menjadikan program desentralisasi harus benar-benar direalisasikan. Karena solusi penambahan kuota di TPA Regional Piyungan hanya bersifat sementara dan tidak akan menyelesaikan masalah sampah secara fundamental.

"Meski dalam situasi darurat sampah TPA Regional Piyungan sempat dibuka, tapi kami minta Pemkab maupun Pemkot tidak bergantung kepada TPA Piyungan. Karena kalau setiap ada masalah dibuang ke TPA Piyungan masih bisa, *kan ra bakal rampung*. Karena tidak bisa *njagakke* (selalu tergantung) dengan TPA Piyungan, tidak bisa begitu terus," tandas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Kapatihan, Yogyakarta, Selasa (6/8).

Pemkab Sleman secara informal mengajukan penambahan kuota pembuangan sampah 500-1.000 ton. Sementara Pemkot Yogya dan Pemkab Bantul masing-masing dengan kuota 200 ton. Menurut Beny, kondisi di TPA Piyungan saat ini mampu menampung 1.000 ton sampah. Kuota ini dapat dimanfaatkan untuk pergeseran sampah dari beberapa daerah. Dengan catatan untuk mengurangi penumpukan sampah, termasuk di sejumlah ruas jalan. Kendati demikian bukan berarti apabila ada tumpukan sampah di depo atau sejumlah ruas jalan langsung bisa ditampung ke TPA Regional Piyungan, mengingat ada keterbatasan.

"Memang di sana diperkirakan masih bisa menampung sekitar 1.000 ton. Tapi kalau itu dilepas terus, *kan ora rampung-rampung mengko*. Artinya kita harus dialog, langkah konkret apa yang perlu dilakukan, karena tidak mungkin selamanya mengandalkan TPA Piyungan," jelasnya.

Dimintai tanggapan soal kuota penambahan sampah untuk Sleman, Sekda DIY belum bisa memastikan. Mengingat Pemkab Sleman belum bersurat secara resmi. Jadi permintaan penambahan kuota pembuangan sampah baru disampaikan secara informal. Kendati demikian pihaknya tidak langsung menyetujui penambahan kuota 1.000 ton. Pasalnya jika langsung diloloskan semua bisa berdampak kepada TPA Piyungan maupun daerah lain yang juga mengajukan kuota.

"Kalau untuk pengajuan penambahan kuota secara formal belum mengajukan, karena sampai hari ini saya belum dapat surat resminya. Sementara kuota maksimal di sana tinggal 1.000 ton. Untuk itu kami terus mendorong agar Pemkab maupun Pemkot merumuskan manajemen risiko secara matang. Termasuk atas kemunculan residu dari pengolahan sampah. Apabila tak dipersiapkan, kondisi ini dapat menjadi masalah baru," paparnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005